BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

OUTLOOK PSKIG 2018

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial

2018

Tagline
Pusat Standardisasi dan Kelembagaan
Informasi Geospsial :

" Mengawal Informasi Geospasial dengan Standar "

Kata Pengantar

"Outlook Pusat Standardisasi dan Kelembagaan 2018", ini merupakan ringkasan kegiatan atas capaian pelaksanaan Pusat SKIG tahun 2018. Outlook PSKIG 2018 ini sesuai dengan output Rencana kerja yang telah ditetapkan, yaitu :

- Meningkatnya Jumlah K/L/P yang Menggunakan Standar Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Meningkatnya Kepuasan Pengguna Produk dan Layanan PSKIG
- Meningkatnya Standar Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Penyelenggaraan Informasi Geospasial
- Tersedianya Rumusan Kebijakan Teknis di Bidang Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial yang Relevan dengan Kebutuhan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Sesuai Program Prioritas Nasional
- Terbangunnya Jaringan Informasi Geospasial Nasional
- Terselenggaranya Reformasi Birokrasi PSKIG Sesuai dengan Roadmap Reformasi Birokrasi BIG 2016-2019

Selain itu terkait dengan 6 output kegiatan, yaitu : Penguatan Simpul Jaringan untuk menunjang Kebijakan Satu Peta dalam kerangka JIGN; Pengembangan SDM Informasi Geospasial dan SDM Tersertifikasi; Pembangunan dan Pembinaan Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS); Lembaga Penilaian Kesesuaian Bidang Informasi Geospasial, Perumusan-Penerapan dan Evaluasi Standar Informasi Geospasial serta Rancangan SNI.

Dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan Kepala BIG, Deputi IIG, Sestama sekaligus KPA yang telah memberikan kritik dan saran sehingga pelaksanaannya berjalan lancar. Juga kepada Biro Perencanaan dan Inspektorat BIG yang telah mengawal dalam proses perancanaan serta pengawasannya. Selain itu juga kepada kolega di masing-masing pusat yang telah membantu memperlancar kegiatan di SKIG pada tahun 2018.

Terimakasih juga kepada Kepala Bidang di Lingkungan SKIG, PPK-IIG berserta jajaran, PPSPM, beserta staf teknis di SKIG yang berkerja sangat serius tanpa mengenal lelah, sehingga sasaran 2018 sesuai dengan yang telah ditetapkan, yakni realisasi keuangan sebesar 95,12% dan realisasi fisik sebesar 100%.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran tetapi utuh, namun tentunya masih banyak kekurangan. Oleh karena itu kami dengan senang menerima kritik dan saran demi kemajuan yang akan datang. Demikian semoga bermanfaat.

Cibinong, 29 Desember 2018
Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG

Suprajaka
Kepala Pusat SKIG

Perjanjian Kinerja
Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG
Tahun 2018

OUT LOOK PSKIG 2018

Meningkatnya Jumlah KLP yang Menggunakan Standar Penyelenggaraan IG (10%)

14%
(TARGET 10%)

2017

14 K/L/P

BIG, BMKG, KLHK, ESDM, ATR/BPN, KEMENTAN, PUPERA, BRG, KEMENDAGRI, KEMENHUB, KEMENDES, PROV. JAWA BARAT, KALIMANTAN TIMUR, ACEH

2018

16 K/L/P

BIG, BMKG, KLHK, ESDM, ATR/BPN, KEMENTAN, PUPERA, BRG, KEMENDAGRI, KEMENHUB, KEMENDES, PROV. JAWA BARAT, KALIMANTAN TIMUR, ACEH PAPUA BARAT, JAWA TIMUR

Meningkatnya Kepuasan Pengguna Produk dan Layanan PSKIG (3,8)

Nilai Indeks Kepuasan Produk dan Layanan PSKIG Tahun 2018:

3,90

(KATEGORI: PUAS)

Persentase kepuasan:

77,91%

OUT LOOK PSKIG

Meningkatnya Standar Peran Serta Masyarakat dalam Mendukung Penyelenggaraan IG.

- Pedoman Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan batas Desa/Kelurahan
- Standar Survei Hidrografi untuk Penyediaan IGD Skala 1:10.000
- Standar Pemetaan Lahan Gambut Skala 1:50.000
- Spesifikasi Teknis Penyajian Peta Desa
- Pedoman Penjaminan Kualitas IG
- Pemutakhiran KUGI
- Standar Mekanisme Penyebarluasan VGI

7

RAPERKA

KEGIATAN LAIN :

- Standar Biaya Pengadaan Barang dan Jasa (dh. SBM)
- Analisis Teknis Penyelenggaraan IG (dh. ABK)
- Kajian Profil Metadata Spasial Indonesia
- Standar Ketelitian Peta Dasar
- Standar Pengumpulan Pengolahan IGD Skala Besar

Sampai dengan 2018 terdapat :

85 SNI

OUT LOOK PSKIG 2019

Tersedianya rumusan kebijakan teknis dibidang standardisasi dan kelembagaan informasi geospasial yang relevan dengan kebutuhan penyelenggaraan IG sesuai program prioritas nasional

Penyusunan Dokumen Rancangan SNI Bidang Informasi Geospasial :

- RSNI Pemetaan Biomassa di atas Permukaan Skala 1:250.000
- RSNI Pemetaan rawan Karhutla Skala 1:250.000
- RSNI Penyajian Peta RBI Skala 1:250.000, 1:50.000 dan 1:25.000 (Kaji Ulang)

3 RANCANGAN SNI BIDANG INFORMASI GEOSPASIAL

3 DOKUMENTASI SKKNI DAN HARMONISASI PROFESI BIDANG IG (ASEAN)

Penyusunan Dokumen Implementasi SKKNI dan Harmonisasi Profesi Bidang IG (ASEAN) :

- Dokumen Evaluasi Implementasi SKKNI dan KKNI Bidang IG
- Dokumen Mutual Recognition Agreement (MRA) on surveying
- Dokumen Proyeksi Pengembangan SDM Bidang IG 2020 – 2024

Penyusunan Dokumen Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Informasi Geospasial :

- Perubahan Keputusan Kepala BIG Nomor 21.3 Tahun 2017 tentang Standar Persyaratan Peserta Uji Sertifikasi Tenaga Profesional IG
- Tata Cara Sertifikasi Penyedia Jasa dibidang Informasi Geospasial
- Standar Biaya Sertifikasi Penyedia Jasa di Bidang Informasi Geospasial
- Perubahan SK Kepala BIG Nomor 27 tahun 2017 tentang Klasifikasi dan Kualifikasi Penyedia Jasa di Bidang IG

4 DOKUMEN AKREDITASI & SERTIFIKASI IG

OUT LOOK PSKIG 2018

Terbangunnya Jaringan Informasi Geospasial Nasional

Kondisi Status Simpul Jaringan Daerah dan Kementerian/Lembaga serta PPIDS Tahun 2018

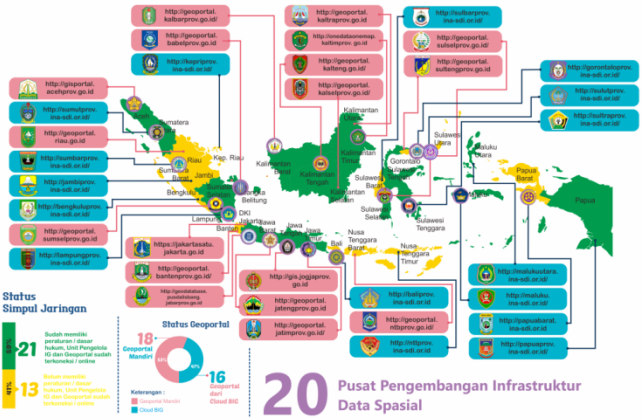

Status Simpul Jaringan

- SIAP: 21 — Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, Unit Pengelola IG dan Geoportal sudah terkoneksi / online
- BELUM: 13 — Belum memiliki peraturan / dasar hukum, Unit Pengelola IG dan Geoportal sudah terkoneksi / online

Status Geoportal

20 Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial

Status Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga

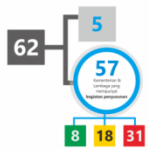

Status K/L Kebijakan Satu Peta

Terselenggaranya Reformasi Birokrasi PSKIG sesuai Road Map Reformasi Birokrasi BIG 2016-2019

REALISASI RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI PSKIG 2018 :

100%

Nilai Capaian Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkup PSKIG tahun 2018:

3,91 *(Target 2,7)*

- Manajemen perubahan : Tim RB, Logbook, Monev,
- Penataan peraturan perundangan : terkait standar IG, SDM, dan SJ
- Penataan dan penguatan organisasi : Komtek 07-01, PPIDS, KKPK IG, Sekretariat JIGN, dll
- Penataan Tatalaksana : SOP terkait Standar IG, SDM, dan SJ
- Penataan sistem manajemen SDM : analisis beban kerja, Pelatihan Bahasa
- Penguatan akuntabilitas : Triwulan 1,2,3,4 dan LAKIP
- Penguatan Pengawasan : SPIP, APIP, Analisis benturan kepentingan dll

RKAKL

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG

Tahun 2018

010
Standar IG yang dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi

003
Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang tersusun

005
Pusat Pengembangan Infrastuktur Data Spasial (PPIDS) yang Dibangun dan Dibina

011
Rancangan SNI yang dirumuskan, diterapkan, dan dievaluasi

008
Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) bidang Informasi Geospasial

009
Simpul Jaringan IG terkait dengan Reforma Agraria yang terbangun dan operasional

OUTPUT	ANGGARAN (Rp)
003	1,750,000,000
005	1,000,000,000
008	1,250,000,000
009	6,500,000,000
010	2,486,800,000
011	1,686,730,000
TOTAL	**14,673,530,000**

7 Rancangan Peraturan Badan dalam Standardisasi Informasi Geospasial

Rancangan Standardisasi Nasional Informasi

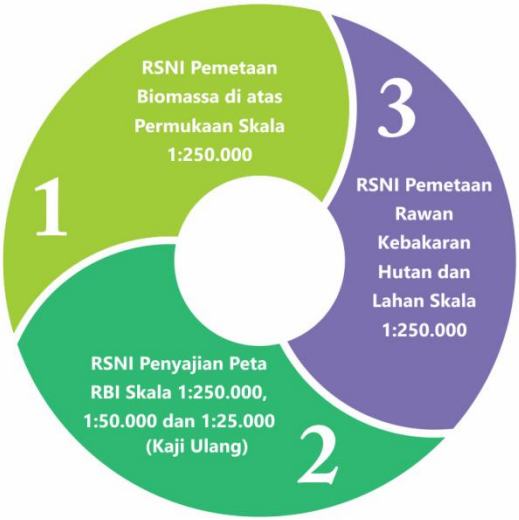

Kegiatan Tambahan

1. Standar Biaya Pengadaan Barang dan Jasa (dh. SBM)
2. Analisis Teknis Penyelenggaraan IG (dh. ABK)
3. Kajian Profil Metadata Spasial Indonesia
4. Standar Ketelitian Peta Dasar
5. Standar Pengumpulan Pengolahan IGD Skala Besar

Skema SDM dan Industri Informasi Geospasial

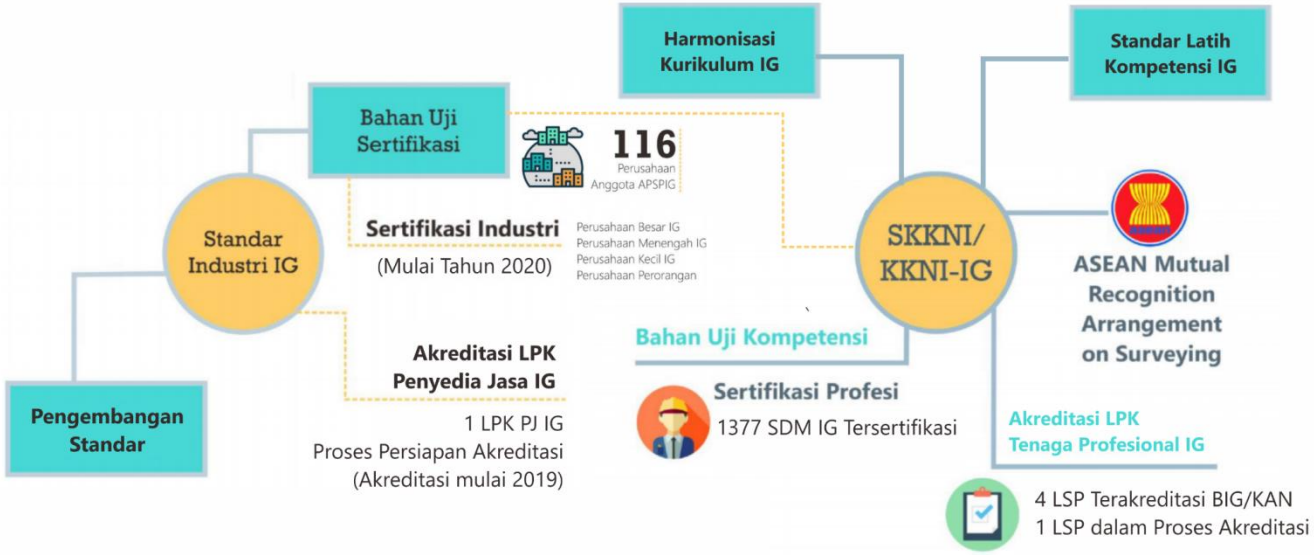

Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial

SDM IG
KELAS DUNIA

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Surveying

Akreditasi LSP

4 LSP Akreditasi KAN/BIG
1 LSP Proses Akreditasi

Bahan Uji Kompetensi

Sertifikasi Profesi
1377 SDM Tersertifikasi

Standar Latih Kompetensi IG

1 Lembaga Pelatihan/ Kursus

Harmonisasi Kurikulum IG

SKKNI/ KKNI-IG

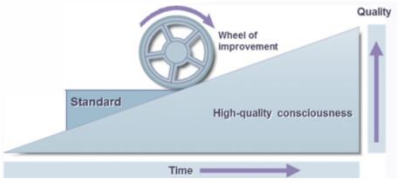

Industri Informasi Geospasial

INDUSTRI IG
KELAS DUNIA

Akreditasi LPK Penyedia Jasa IG (Industri)

Bahan Uji Sertifikasi Penyedia Jasa IG

Pengembangan Standar Industri IG

Standar Industri IG

1 LPK
Penyedia Jasa IG

Sertifikasi Industri IG
(Mulai Tahun 2020)

116
Perusahaan
Anggota APSPIG

Perusahaan Besar IG
Perusahaan Menengah IG
Perusahaan Kecil IG
Perusahaan Perorangan

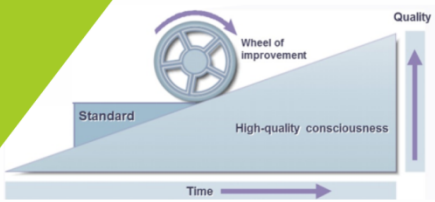

Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG sebagai

Sekertariat *ASEAN Education Tahun 2018*

www.aseansurveyingedu.big.go.id

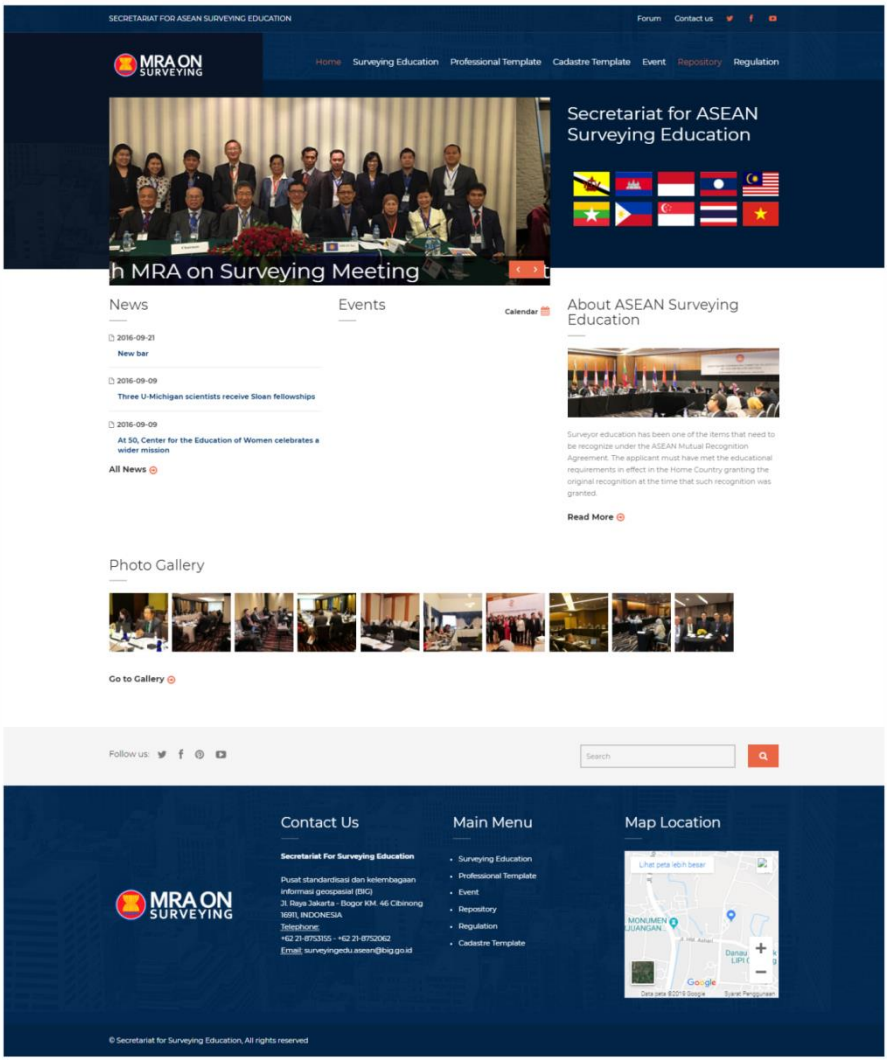

Status Simpul Jaringan Kementerian/Lembaga

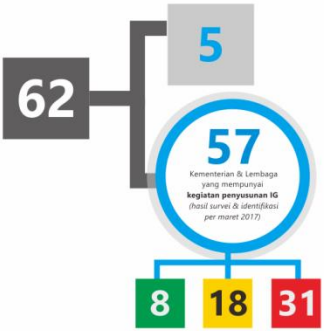

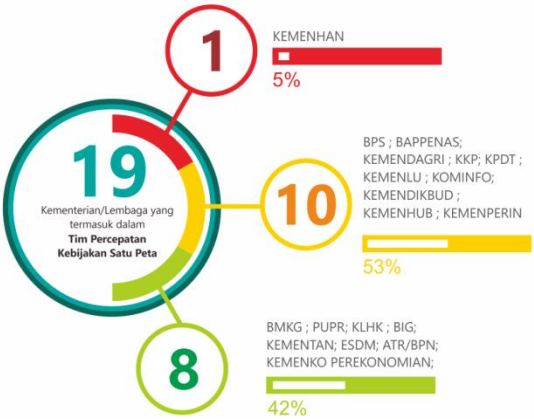

Status Simpul Jaringan Provinsi

59% **21** Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, Unit Pengelola IG dan Geoportal sudah terkoneksi / online

41% **13** Belum memiliki peraturan / dasar hukum, Unit Pengelola IG dan Geoportal sudah terkoneksi / online

Website Monitoring

Jaringan Informasi Geospasial Nasional

www.jign.big.go.id

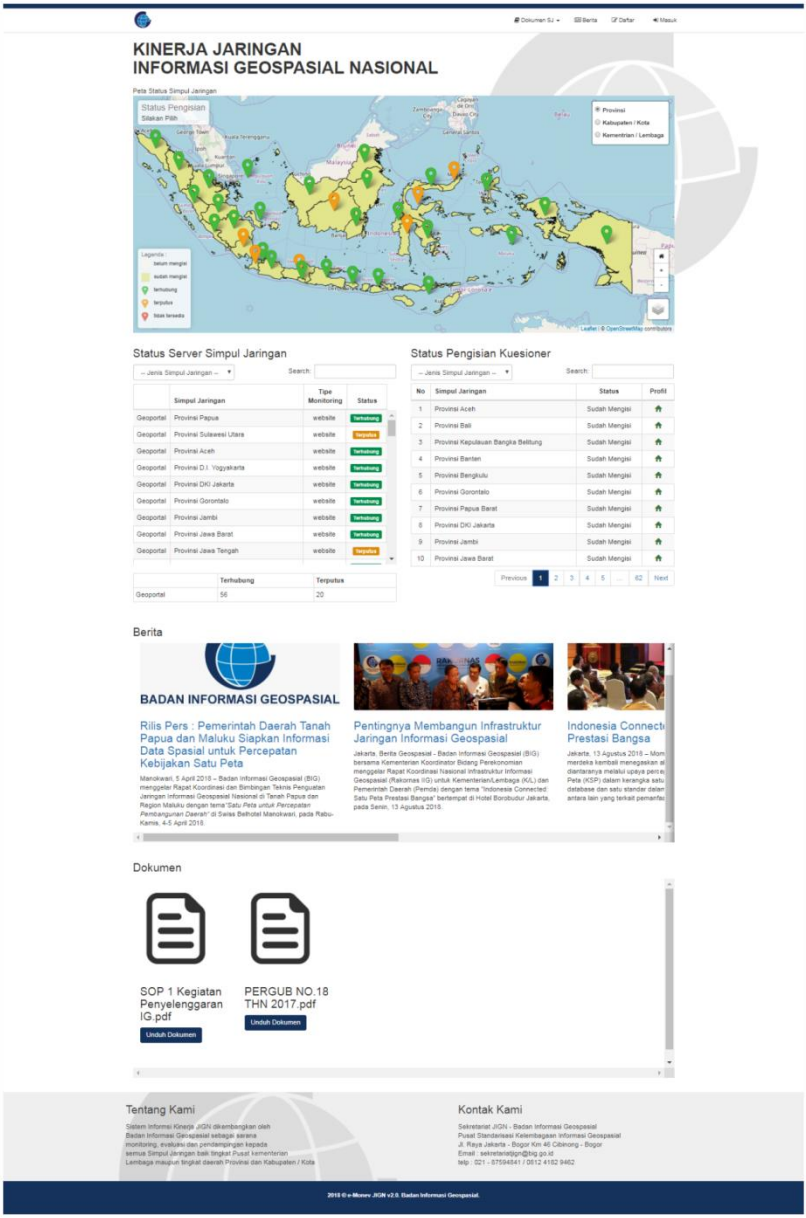

Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Simpul Jaringan Informasi Geospasial

STATUS
SIMPUL JARINGAN REGIONAL SUMATERA

Per Oktober 2018

Keterangan :

- Geoportal Mandiri
- Cloud BIG
- Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
- Belum memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online

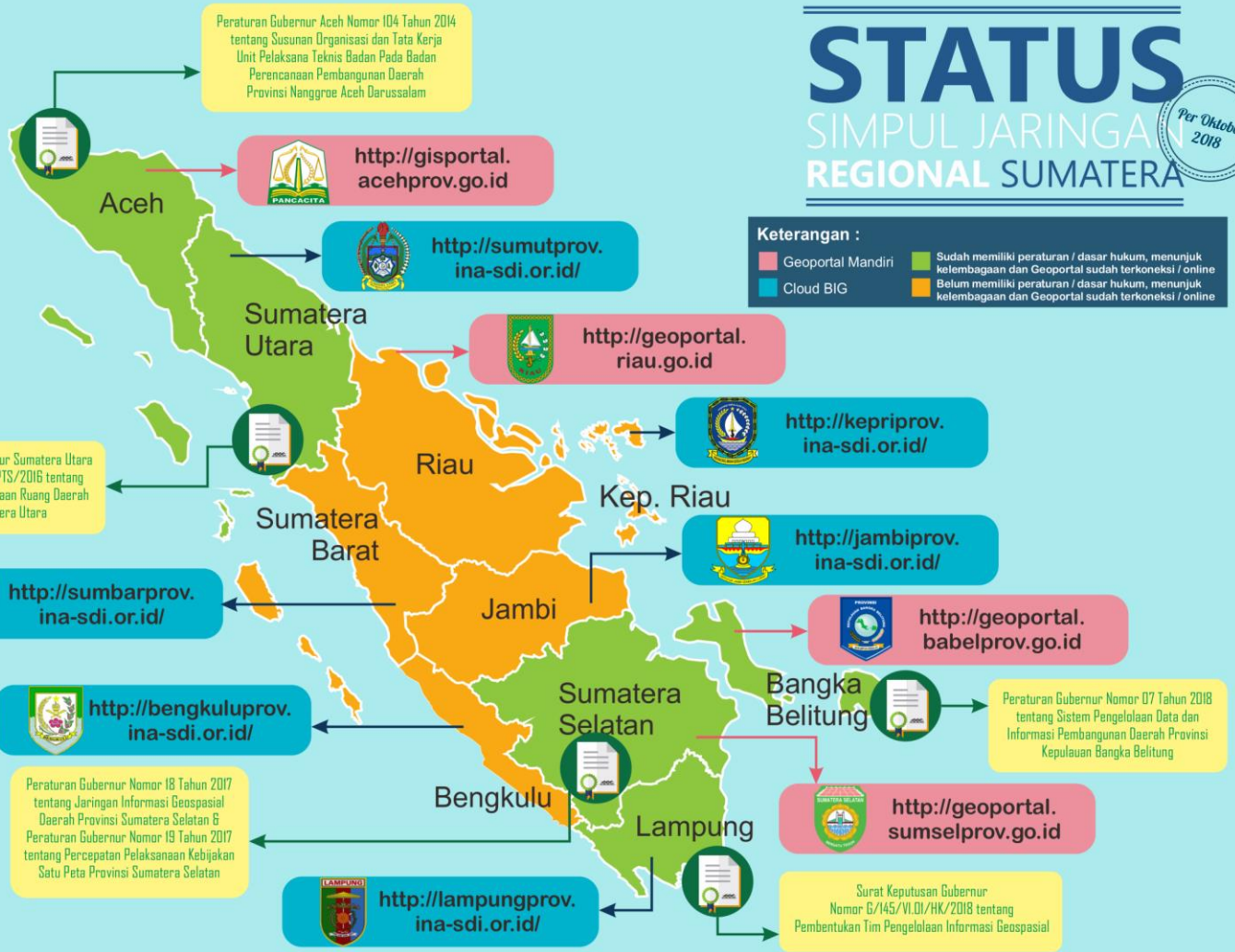

STATUS
SIMPUL JARINGAN REGIONAL KALIMANTAN

Per Oktober 2018

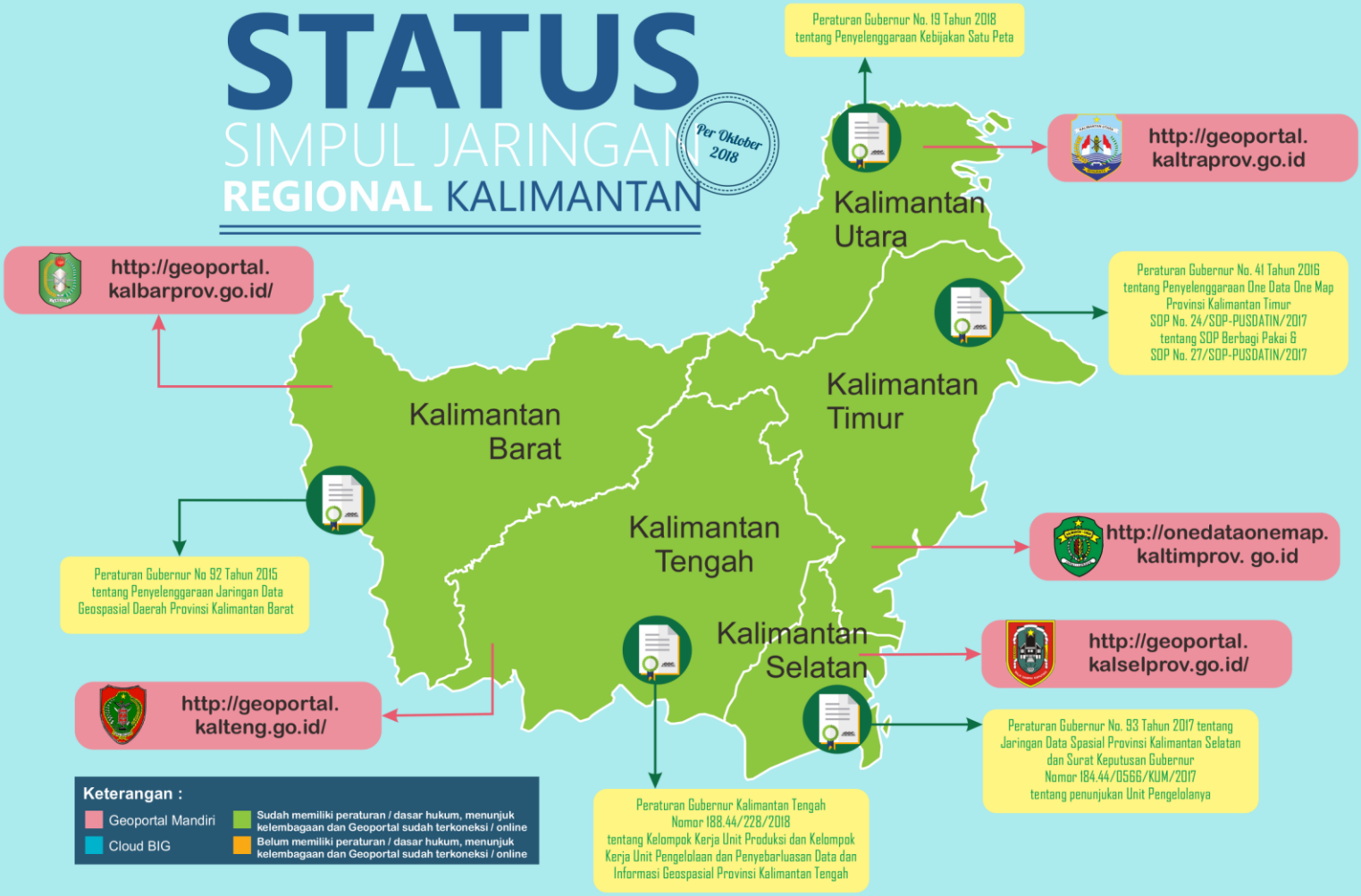

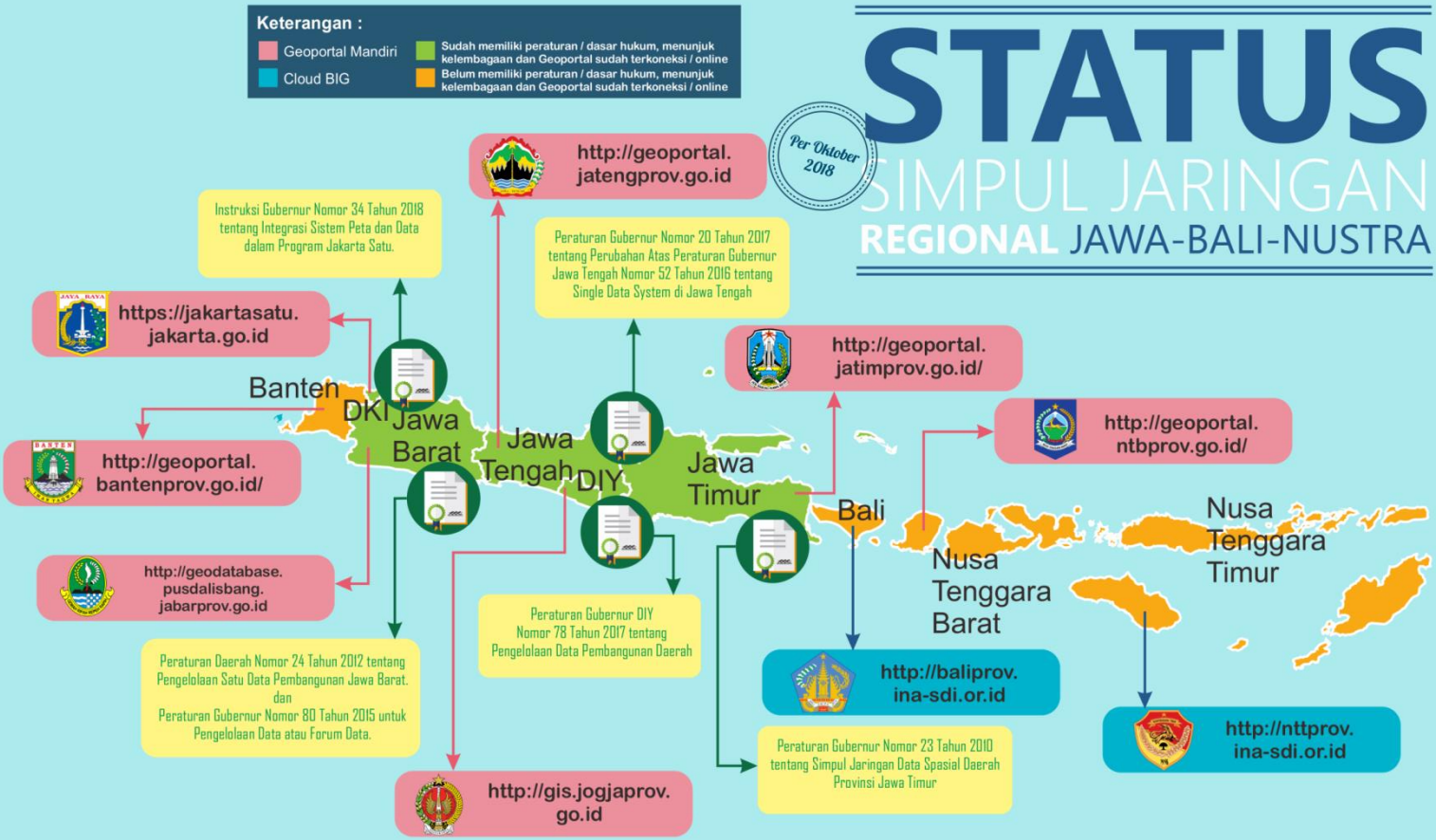
Keterangan :
Geoportal Mandiri
Cloud BIG
Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
Belum memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
STATUS
SIMPUL JARINGAN
REGIONAL JAWA-BALI-NUSTRA
Per Oktober 2018
http://geoportal.jatengprov.go.id
Instruksi Gubernur Nomor 34 Tahun 2018 tentang Integrasi Sistem Peta dan Data dalam Program Jakarta Satu.
Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016 tentang Single Data System di Jawa Tengah
https://jakartasatu.jakarta.go.id
http://geoportal.jatimprov.go.id/
http://geoportal.ntbprov.go.id/
Banten
DKI
Jawa Barat
Jawa Tengah
DIY
Jawa Timur
Bali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
http://geoportal.bantenprov.go.id/
http://geodatabase.pusdalisbang.jabarprov.go.id
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Satu Data Pembangunan Jawa Barat.
dan
Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2015 untuk Pengelolaan Data atau Forum Data.
Peraturan Gubernur DIY Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Data Pembangunan Daerah
http://baliprov.ina-sdi.or.id
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2010 tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Jawa Timur
http://nttprov.ina-sdi.or.id
http://gis.jogjaprov.go.id

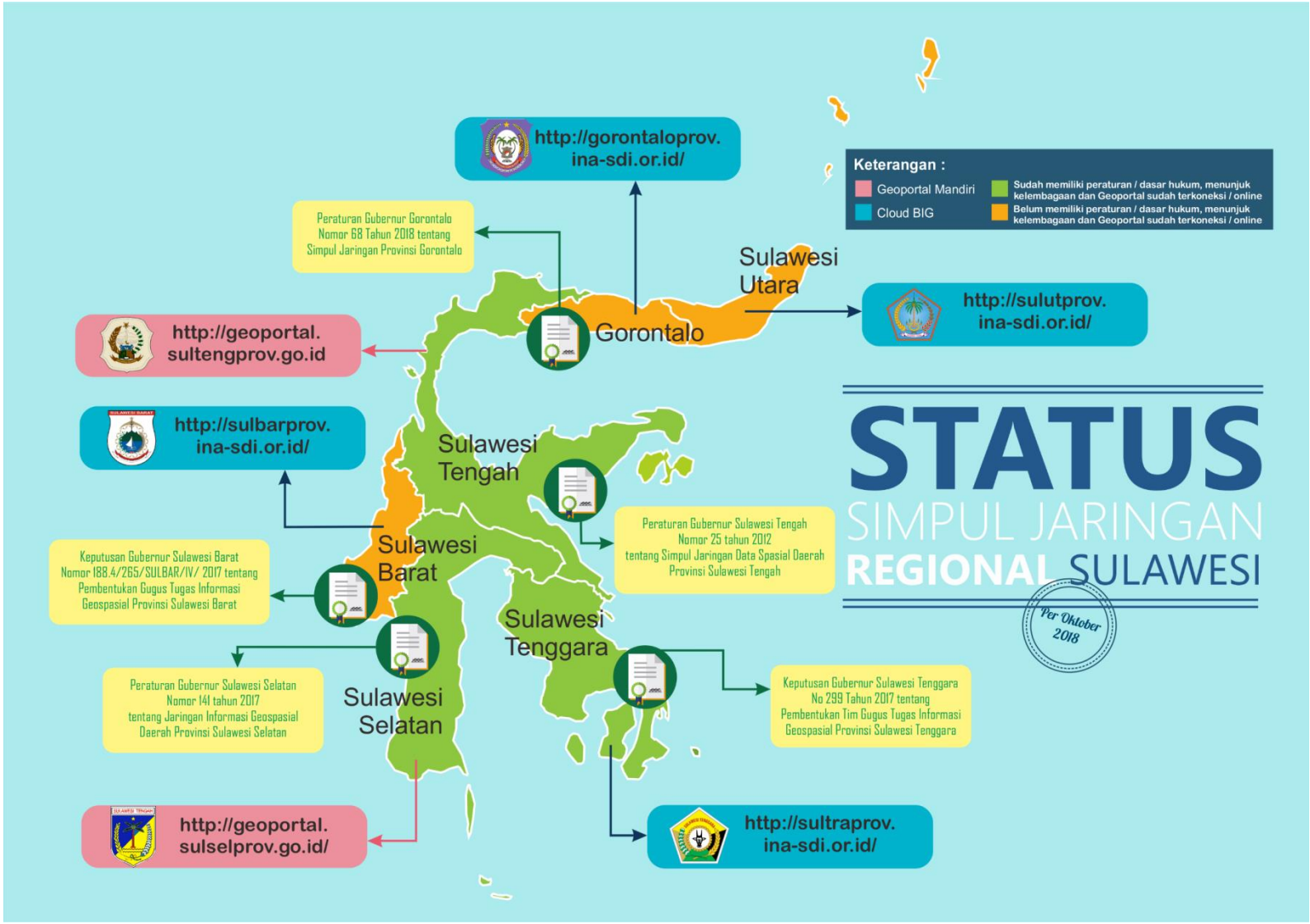
http://gorontaloprov.
ina-sdi.or.id/
Keterangan :
Geoportal Mandiri
Cloud BIG
Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
Belum memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
Peraturan Gubernur Gorontalo
Nomor 68 Tahun 2018 tentang
Simpul Jaringan Provinsi Gorontalo
Sulawesi
Utara
http://sulutprov.
ina-sdi.or.id/
Gorontalo
http://geoportal.
sultengprov.go.id
http://sulbarprov.
ina-sdi.or.id/
Sulawesi
Tengah
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah
Nomor 25 tahun 2012
tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Keputusan Gubernur Sulawesi Barat
Nomor 188.4/265/SULBAR/IV/ 2017 tentang
Pembentukan Gugus Tugas Informasi
Geospasial Provinsi Sulawesi Barat
Sulawesi
Barat
Sulawesi
Tenggara
Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan
Nomor 141 tahun 2017
tentang Jaringan Informasi Geospasial
Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Sulawesi
Selatan
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
No 239 Tahun 2017 tentang
Pembentukan Tim Gugus Tugas Informasi
Geospasial Provinsi Sulawesi Tenggara
http://geoportal.
sulselprov.go.id/
http://sultraprov.
ina-sdi.or.id/
STATUS
SIMPUL JARINGAN
REGIONAL SULAWESI
Per Oktober
2018

STATUS
SIMPUL JARINGAN
REGIONAL PAPUA-MALUKU

Per Oktober 2018

http://malukuutara.ina-sdi.or.id/

http://papuabarat.ina-sdi.or.id

Peraturan Gubernur Maluku Utara
Nomor 11 Tahun 2013
tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah
dan Unit Kliring Provinsi Maluku Utara

Maluku Utara

Peraturan Gubernur Papua No. 19 Tahun 2017
Tentang Pengelolaan
Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang
(SIMTARU)

Papua Barat

Maluku

Papua

http://maluku.ina-sdi.or.id/

Peraturan Gubernur Maluku
No. 80 tahun 2018
tentang Simpul Jaringan
Provinsi Maluku

http://papuaprov.ina-sdi.or.id/

Keterangan :

- Geoportal Mandiri
- Cloud BIG
- Sudah memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online
- Belum memiliki peraturan / dasar hukum, menunjuk kelembagaan dan Geoportal sudah terkoneksi / online

Simpul Jaringan Terbaik

Kategori Kabupaten/Kota

Bhumandala Kanaka

Kab. Sleman

Bhumandala Kanaka

Kota Manado

Bhumandala Rajata

Kota Bontang

Bhumandala Rajata

Kab. Kolaka

Bhumandala Ariti

Kab.Banyuasin

Bhumandala Ariti

Kab. Kulon Progo

Bhumandala Ariti

Kab. Sragen

Simpul Jaringan Terbaik

Kategori Provinsi

Bhumandala Kanaka

DKI Jakarta

Bhumandala Rajata

DI.Yogyakarta

Bhumandala Rajata

Kalimantan Timur

Bhumandala Rajata

Sumatera Selatan

Bhumandala Ariti

Kalimantan Selatan

Bhumandala Ariti

Lampung

Simpul Jaringan Terbaik

Kategori Kementerian/Lembaga

Bhumandala Kanaka
KLHK

Bhumandala Kanaka
PUPR

Bhumandala Rajata
ESDM

Bhumandala Rajata
BMKG

Bhumandala Rajata
Kementerian Perhubungan

Bhumandala Arti
Kementerian Pertanian

Bhumandala Kencana

Pemanfaatan Simpul Jaringan Terbaik

Kabupaten/Kota : Kota Manado
Provinsi : Sumatera Selatan
K/L : BMKG

Geoportal Terbaik

Kabupaten/Kota : Kab. Sleman
Provinsi : DI.Yogyakarta
K/L : ESDM

Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial (PPIDS)

20
PPIDS

Anggaran
Pusat Standardisasi dan Kelembagaan IG

PAGU :

Rp.14.673.530.000

Realisasi :

Rp.13.958.126.024

Presentase Realisasi :

95.12

Terima Kasih